

# Kumpulan Berita

# Kegiatan Magang di Federal Court of Australia



**Kumpulan Berita Kegiatan Magang di Federal Court of Australia yang  
Dipublikasikan di Website Kepaniteraan**

<b>No</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Tanggal Publikasi</b>	<b>Penulis</b>
1	MA dan FCA Selenggarakan Kerjasama Program Magang Manajemen Perkara	8 Mei 2012	Asep Nursobah
2	Justice Bernard Murphi: Template dan Format Putusan Membantu Percepatan Penyelesaian Perkara	9 Mei 2012	Asep Nursobah
3	e-Lodgment FCA Serupa dengan Fitur Komunikasi Data Direktori Putusan	10 Mei 2012	Asep Nursobah
4	Melihat Ruang Sidang FCA dari Dekat: High Tech dan Humanis	10 Mei 2012	Asep Nursobah
5	Pendekatan Kreatif Mengelola Arsip	10 Mei 2012	Asep Nursobah
6	Mempermudah Kerja Pengadilan, Semua Dokumen Terstandarkan	10 Mei 2012	Asep Nursobah
7	Atasi Tunggakan Perkara, FCA terapkan Individual Docket System	15 Mei 2012	Asep Nursobah
8	Memastikan Perkara Selesai Tepat Waktu, FCA Lakukan Realokasi Perkara	15 Mei 2012	Asep Nursobah
9	Dua Jam Bersama Pak Murphy: Dari Class Action, Penyusunan Putusan hingga Ulang Tahun Pak Bambang	15 Mei 2012	Asep Nursobah
10	Semua Informasi yang Dibutuhkan Hakim, Tersedia di Perpustakaan FCA	17 Mei 2012	Asep Nursobah
11	Putusan Sederhana Ala FCA	17 Mei 2012	Binziad Kadafi
12	Imaginasi! Hal Penting Untuk Rekayasa Proses Kerja Pengadilan	18 Mei 2012	Binziad Kadafi

## MA dan FCA Selenggarakan Kerjasama Program Magang Manajemen Perkara



*Kiri ke Kanan: Subur, Asep Nursobah, Nicola Colbran, Mia Hafhari, Bambang Heri Mulyono, dan Akhmad Cholil mengawali kegiatan Supreme Court of Indonesia Internship Program 2012, Senin (7/5) di Kepaniteraan Federal Court Negara Bagian Victoria, Australia.*

Melbourne | Kepaniteraan.online (8/5)

Program Magang Mahkamah Agung (MA) di Federal Court of Australia (FCA) dimulai hari Senin, 7 Mei 2012, Pukul 10.00 waktu setempat. Program bertajuk *Supreme Court of Indonesia Internship Program 2012* ini merupakan aktifitas yang dipayungi oleh MoU antara MA dan FCA yang difasilitasi oleh *Indonesia Australia for Partnership Justice (IAPJ)* dengan biaya AusAid. Peserta magang dari MA adalah Bambang Heri Mulyono (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan umum), Subur (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan TUN) dan Asep Nursobah (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan agama).

Program magang ini dibuka oleh Warwick Soden, Chief Executive Officer/Registrar FCA bertempat di Judge Conference Room , Law Court Building, Melbourne . Hadir dalam acara pembukaan tersebut , Justice Bromberg, Justice Murphy , Sia Lagos (Kepala Kepaniteraan FCA Negara Bagian Victoria), Angela Josan (Panitera untuk urusan banding), Louise Kenworthy (Direktur Pelayanan Peradilan), David Priddle (Direktur Operasional FCA), dan Andera Jarratt (Executive Officer). Selain itu, hadir pula Nicola Colbran, Direktur Program AIPJ.

Pada hari pertama program magang, para peserta diperkenalkan dengan lingkungan kerja FCA. Melalui agenda "*welcome and Tour of The Court*", Sia Lagos, kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria, mengajak peserta magang untuk keliling ke ruang kepaniteraan, meja informasi, ruang sidang, dan ruang hakim. Sia Lagos pun mengajak peserta untuk mampir di "meja satu" Family Court of Australia yang berada di gedung yang sama.

## **Keamanan Pengadilan**

"Memasuki gedung FCA seperti masuk ke bandara", demikian komentar salah seorang peserta magang. Pengunjung pengadilan disambut dengan metal detector dan pemeriksaan sinar x untuk barang bawaan, seperti tas dan sejenisnya. Petugas tidak memberikan kompromi ketika alat memberi informasi adanya logam dan barang yang mencurigakan. Semuanya harus benar-benar steril , baru diperbolehkan masuk. Prosedur pemeriksaan tersebut diperlakukan juga kepada peserta magang. "Ini adalah prosedur tetap untuk memberikan perlindungan keamanan pengadilan", ujar petugas.

Sementara bagi karyawan, disediakan jalur khusus yang hanya bisa diakses dengan menggunakan kartu berteknologi pintar , RFID. Masih untuk alasan keamanan, publik hanya bisa mengakses ruang sidang dan ruang pendaftaran perkara. Publik tidak bisa "seenaknya" memasuki ruang staf dan pejabat peradilan. Bahkan, untuk hakim ruangannya dipisah sehingga jangankan publik, staf pun tidak bebas keluar-masuk ruangan tersebut.

Hal lain yang menarik dari gedung FCA selain tentu kesan modern yang kental adalah perhatian terhadap pencari keadilan yang berkebutuhan khusus. PCA menyediakan kursi roda, serta petunjuk ruangan yang bisa diakses publik selalu disertai tulisan braille. Selain itu, terdapat poster yang menginformasikan adanya jasa penerjemah, jika pencari keadilan tidak bisa berbahasa Inggris.

## **Mengatasi Tunggakan Perkara**

Tunggakan perkara adalah persoalan utama yang hampir dihadapi oleh peradilan di dunia, termasuk FCA. Menurut Warwick Sodden, CEO/Registrar FCA, dalam presentasi setelah acara "*tour of the court*", pembatasan perkara adalah cara yang efektif untuk mencegah terjadinya tunggakan perkara. Ia mengilustrasikan bahwa tidak semua perkara bisa diperiksa di tingkat High Court (Indonesia: Mahkamah Agung,red). High Court hanya memeriksa perkara yang sudah diizinkan melalui pemeriksaan "*leave to appeal*" yang dilakukan oleh hakim tunggal. Warwick mengatakan bahwa Hakim tunggal ini tidak akan memberi izin pemeriksaan di tingkat High Court jika perkara tersebut bobotnya ringan sehingga harus selesai di tingkat banding federal court atau pengadilan tertinggi di negara bagian (supreme court).



*SERIUS : Peserta magang membicarakan persoalan manajemen perkara yang menjadi fokus kegiatan yang akan berlangsung hingga 20 Mei mendatang*

"Jika tidak ada mekanisme filter, maka hakim High Court yang hanya berjumlah 7 orang untuk menangani perkara nasional Australia tidak akan mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan", jelas Warwick.

Upaya lain untuk mencegah tunggakan perkara adalah diperkenalkannya hakim tunggal untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. "Tidak semua perkara diperiksa dengan tiga orang hakim (full court), banyak kasus yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal", Warwick menegaskan.

Selain pembatasan perkara dan hakim tunggal, proses mediasi memberikan sumbangan cukup signifikan dalam mencegah terjadinya tunggakan perkara. "Dari perkara yang diajukan 50 % selesai dengan mediasi", ungkap Sia Lagos menjawab pertanyaan peserta magang.

### **Adopsi Manajemen Dunia Usaha**

FCA mulai melakukan pembaruan peradilan sejak tahun 90-an. Pembaruan peradilan yang dilakukan menggunakan pendekatan yang kreatif. "Kami menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh dunia usaha ketika mereka berkompetisi dan meningkatkan performancenya", ujar Warwick Soden kepada para peserta magang di sesi terakhir pada hari pertama.

Warwick menjelaskan beberapa kunci utama pembaruan peradilan di FCA. Pertama adalah fokus pada pelanggan. FCA menganalogikan pencari keadilan sebagai pemegang saham. Sehingga orientasi pelayanan pengadilan harus kepada kepentingan dan kepuasan pencari keadilan. "Karena berkat pajak mereka pengadilan bisa beroperasi,"

ungkap Warwick. Ia pun mengilustrasikan perusahaan telekomunikasi dunia, Motorola, yang bangkrut gara-gara layanannya tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Untuk mengukur kepuasan pelanggan, dikatakan Warwick, FCA melakukan survey terhadap pengunjung mengenai kualitas pelayanan pengadilan. Selain itu FCA selalu memantau semua berita di media yang membicarakan pengadilan.

Untuk urusan media ini, FCA memiliki petugas yang khusus untuk menghadapi media. Petugas ini yang memastikan media tidak salah menyampaikan informasi seputar pengadilan.

Kedua, merubah proses manajemen perkara dengan pendekatan yang mereka sebut "individual docket system". Sistem docket ini memungkinkan pengadilan bisa memonitor kinerja individu. Terkait dengan kinerja individu ini, tiap semester, FCA secara internal memberikan laporan kinerja individu hakim secara nasional. Dalam laporan ini, disebutkan seorang hakim berada di level berapa dalam skala nasional. "Dengan sistem ini, yang bersangkutan akan terdorong berusaha untuk meningkatkan peringkatnya pada periode penilaian berikutnya", ungkap Warwick.

"Ketua Pengadilan untuk sementara tidak akan memberi tugas untuk mengadili di negara bagian lain terhadap hakim yang berkinerja rendah." jawab Warwick ketika ditanya mengenai sanksi terhadap hakim yang berkinerja rendah.

Ke tiga adalah mendekatkan pengadilan ke publik. Untuk pendekatan ini, FCA pernah menyelenggarakan lomba bertajuk "the art delivering justice". Lomba ini digelar di kalangan pelajar sehingga mereka mengenal pengadilan dari dekat. "lukisan yang terpampang di dinding gedung ini hasil dari lomba tersebut", ujar Warwick.

Upaya pembaruan lainnya adalah penggunaan teknologi informasi. Menurut Warwick, teknologi informasi adalah instrumen utama dalam meningkatkan performance pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pembaruan penggunaan IT adalah mutlak. "sesuai dengan tuntutan publik, pengadilan kami sudah menuju e-court", ungkapnya.

Hal lain yang nampak dari digunakannya pendekatan dunia usaha dalam manajemen peradilan di FCA digunakannya nomenklatur Chief Executive Officer (CEO) bagi Panitera-nya. [asnoer]

## Justice Bernard Murphi: Template dan Format Putusan Membantu Percepatan Penyelesaian Perkara



*Peserta Magang membicarakan tentang sistem administrasi peradilan bersama Louise Kenworthy, Director for Court Services FCA, di hari kedua program, hadir dalam pertemuan tersebut Direktur AIPJ Nicola Collbran*

Melbourne | Kepaniteraan.Online (9/5)

Putusan merupakan mahkota pengadilan, oleh karena itu proses penyusunannya perlu mendapat perhatian. Template, format dan teknis penyusunannya sangat penting untuk dikuasai karena akan membantu percepatan penyelesaian perkara. Karena kurang menguasai hal tersebut, seorang hakim akan memerlukan waktu lama untuk menyusun sebuah putusan. Sehingga tidak jarang penyusunan putusan menjadi penyebab lambatnya penyelesaian perkara di pengadilan.

Demikian disampaikan oleh Justice Bernard Murphy, Hakim Federal Court Of Australia, menanggapi presentasi delegasi Indonesia yang berjudul “Overview of key initiatives and reform in Supreme Court of Indonesia”. Presentasi yang disampaikan oleh Bambang Heri Mulyono dan Asep Nursobah tersebut menyinggung soal template putusan di Mahkamah Agung.

Menurut Hakim FCA yang ahli di bidang class action ini, putusan FCA sangat berbeda dengan format putusan MA. “Putusan kami tidak mengulang apa yang sudah ada di putusan pengadilan sebelumnya, sehingga putusan kami tidak sampai puluhan atau ratusan halaman’, ungkap Justice Murphi. Karena format yang demikian dan juga tersedianya template, lanjut Justice Murphi, ia selalu berusaha memberikan salinan putusan pada saat putusan dibacakan.

Sementara Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria memberikan apresiasi terhadap capaian pembaruan peradilan yang telah dicapai dalam

waktu yang sangat cepat. “Fokus pembaruan peradilan anda dan kami sama, namun pengadilan anda telah banyak berubah, padahal pembaruan peradilan baru dimulai tahun 2003” ungkapnya memberikan apresiasi.

## **Pemberian Remunerasi**

Sessi kedua di hari kedua program, peserta nampak antusias. Hal ini karena topik pembicaraan mengenai persoalan yang lagi isu hangat di Indonesia, yaitu persoalan penggajian hakim. Warwick Soden yang menjadi nara sumber sesi ini membawakan materi proses rekrutmen dan sumber daya di FCA. Salah satu topiknya membahas sistem rekrutmen dan remunerasi hakim.

Warwick menjelaskan bahwa yang mengurus remunerasi pengadilan dan pejabat publik lainnya termasuk anggota parlemen adalah satu badan (tribunal) khusus ([www.remtribunal.gov.au](http://www.remtribunal.gov.au)). Badan ini yang mengajukan usulan penggajian ke Parlemen. Parlemen berhak menolak dan menyetujui usulan tribunal tersebut. “Namun, parlemen jarang menolak pengajuan dari Tribunal ini”, tegas CEO FCA ini.

Sementara untuk hakim ada komisi khusus yang khusus untuk “memperhatikan” gaji hakim. Komisi yang bernama Komite Justice ini akan mengajukan usulan kenaikan gaji setiap 12 bulan. Komite akan mengusulkan adanya kenaikan apabila terjadi kenaikan produktifitas dan meningkatnya indeks harga kebutuhan pangan.

Besaran gaji menurut Warwick menunjukkan pentingnya peran jabatan tersebut. “Hakim gajinya sangat besar dan kedudukan mereka sangat tinggi setara dengan parlemen, komisioner, dan pimpinan lembaga tinggi lainnya”, papar Warwick. Gaji dan kedudukan hakim di Australia, menurut Warwick, tidak dibedakan karena perbedaan senioritas, beban kerja, ataupun kewenangan pengadilan.

Dari daftar yang diperlihatkan Warwick, terlihat bahwa hakim FCA mendapatkan remunerasi sebanyak AUS \$ 391.000 per tahun ditambah dengan tunjangan kendaraan AUS \$ 25.000 pertahun. Namun menurut Warwick, pendapatannya sebagai hakim bisa jadi lebih kecil dari pendapatannya dalam profesi sebelumnya. Hal ini karena persyaratan untuk menjadi hakim di FCA harus berasal dari advokat yang telah berpengalaman praktek 5 tahun dan memiliki reputasi internasional dengan melewati seleksi yang ketat.

“Namun mereka bangga dengan perannya yang penting, dan tidak mempersoalkan besaran gajinya”, ujar Warwick.

Sessi terakhir di hari kedua program magang, peserta diberikan wawasan mengenai sistem penganggaran di FCA. Direktur Pelayanan Peradilan, Louise Kenworthy, yang menjadi nara sumber sesi ini memaparkan mengenai proses alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran di FCA. Louis juga menjelaskan mengenai pengelolaan biaya perkara di FCA. Secara umum tidak terlalu banyak perbedaan sistem penganggaran antara FCA dan MA. (an)

## e-Lodgment FCA Serupa dengan Fitur Komunikasi Data Direktori Putusan



*Peserta Magang dari MA mendemonstrasikan aplikasi komunikasi data berkas kasasi, sistem informasi perkara, dan direktori putusan kepada Direktur Palayanan Peradilan FCA. Sistem yang MA miliki memiliki kemiripan dengan sistem FCA*

Melbourne | Kepaniteraan.Online (10/5)

Federal Court of Australia (FCA) membolehkan para pihak untuk mengajukan berkas perkara dengan berbagai cara: langsung mendatangi kepaniteraan, kirim melalui pos, faksimile, email, dan aplikasi komunikasi data yang disebut dengan e-lodgment. E-lodgment adalah fasilitas pengiriman dokumen melalui aplikasi yang disediakan bagi publik melalui website FCA, [www.fedcourt.gov.au](http://www.fedcourt.gov.au). E-Lodgment adalah sistem komunikasi data yang terakhir dikembangkan menggantikan sistem e-mail yang dinilai rentan terhadap infeksi virus. Sistem ini terintegrasi dengan case management system yang dimiliki FCA.

Sistem e-lodgment yang dimiliki FCA ini mirip dengan fitur komunikasi data pada Aplikasi Direktori Putusan (ADP). Bedanya e-lodgment digunakan oleh para pihak untuk mengirim gugatan ke pengadilan. Sedangkan ADP digunakan oleh pengadilan untuk mengirim file elektronik putusan sebagai kelengkapan kasasi dan peninjauan kembali.

e-lodgement diperkenalkan oleh FCA pada hari ketiga program magang oleh Manager Client Services, Lauren McComick dan Director of Court Services, Louis Kenworthy. Keduanya mengajak peserta magang ke ruang kepaniteraan FCA. Lauren McComick mendemonstrasikan sistem e-Lodgment dan case management system yang dimiliki oleh FCA. Setelah Lauren selesai mendemonstrasikan, peserta magang, Asep Nursobah,

berinisiatif untuk mendemonstrasikan fitur komunikasi data ADP, sistem informasi perkara, dan Direktori Putusan. Lauren dan Louise sangat antusias memperhatikan sistem yang dimiliki oleh MA. Keduanya memberikan apresiasi karena MA telah memiliki sistem yang serupa dengan FCA.

### **Beragam Cara Bayar Biaya Perkara**

Bukan hanya cara pengiriman berkas yang bisa menggunakan beragam cara sebagaimana diatur dalam Federal Court Rules 2012 Part 2, pembayaran biaya perkara pun bisa menggunakan cara beragam. Para pihak bisa menggunakan uang tunai, cek, debit, atau kartu kredit. “Bagi para pihak yang menyerahkan langsung berkas ke kepaniteraan FCA, mereka biasanya lebih suka menggunakan uang tunai”, ungkap Lauren McCommick ketika memberikan penjelasan kepada peserta magang di ruang pendaftaran perkara. Sedangkan jika pengiriman berkas perkara menggunakan faks atau e-lodgement, mereka menggunakan kartu kredit. Jika menggunakan cara ini, mereka melampirkan informasi bukti pembayaran melalui form yang telah disediakan di website. Untuk mendukung berbagai cara pembayaran tersebut, kasir FCA dilengkapi dengan mesin cash register dan berbagai mesin “gesek” kartu kredit.

Beragam cara untuk pengiriman berkas perkara, menurut Louise Kenworthy merupakan upaya *access for justice* yang disediakan oleh Federal Court of Australia. Bagaimana dengan pengadilan di Indonesia?. Sudah saatnya pengadilan di kota besar untuk bekerja sama dengan bank sehingga memungkinkan para pihak membayar biaya perkara menggunakan kartu kredit atau debit sebagai bagian dari *access to justice*. [an]

## Melihat Ruang Sidang FCA dari Dekat: HighTech dan Humanis



*Meja sidang FCA untuk panitera pengganti yang dilengkapi dengan fasilitas berteknologi tinggi*

Melbourne | Kepaniteraan.Online (10/5)

Hari ketiga program magang, para peserta diajak untuk melihat ruang sidang FCA. Melihat dari dekat ruang sidang FCA sungguh membuat kita berdecak kagum. Selain ruangan yang nyaman dan modern dengan atribut peralatan berteknologi tinggi, pandangan kami berhenti pada meja para pihak. Disana tersedia gelas dan teko berisi air mineral yang sengaja disajikan untuk mengatasi dahaga para pihak. Kursi pengunjung sidang pun bisa membuat kita enggan berdiri karena sangat nyaman. Sungguh menjadi harmoni yang mengagumkan antara sisi teknologi dan humanisme.

Selanjutnya kami diajak untuk melihat meja sidang hakim dan panitera. Melihat meja panitera pengganti seperti melihat kokpit pilot pesawat. Disana berderet tombol-tombol dan peralatan elektronik yang canggih. Ada monitor layar sentuh untuk mengatur video conference, pesawat telpon, laptop yang tersambung dengan case management system, mesin transkripsi, dan lainnya.

Bahkan di salah satu ruangan sidang yang khusus untuk memeriksa perkara niaga yang melibatkan pihak perusahaan besar, ruang sidang lebih canggih lagi. Ruangan tersebut sudah dipersiapkan untuk e-court. Deretan meja para pihak dilengkapi beberapa komputer. Sekilas lebih mirip kantor bursa efek. Selain itu para pihak yang membawa sendiri laptop disediakan koneksi jaringan. Lemari berkas para pihakpun tersedia disisi kiri ruang sidang.

Di sebelah ruangan sidang khusus tersebut, tersedia ruangan server yang mendukung terselenggaranya proses e-court. FCA menyediakan ruangan khusus untuk menyidangkan perkara sengketa niaga tertentu, dan ruangan tersebut akan tetap dipergunakan untuk satu perkara hingga selesai. Para pihak menyimpan berbagai

properti, seperti laptop, berkas, dokumen yang terkait dengan perkara di ruangan tersebut hingga pemeriksaan selesai beberapa hari atau beberapa minggu kemudian.

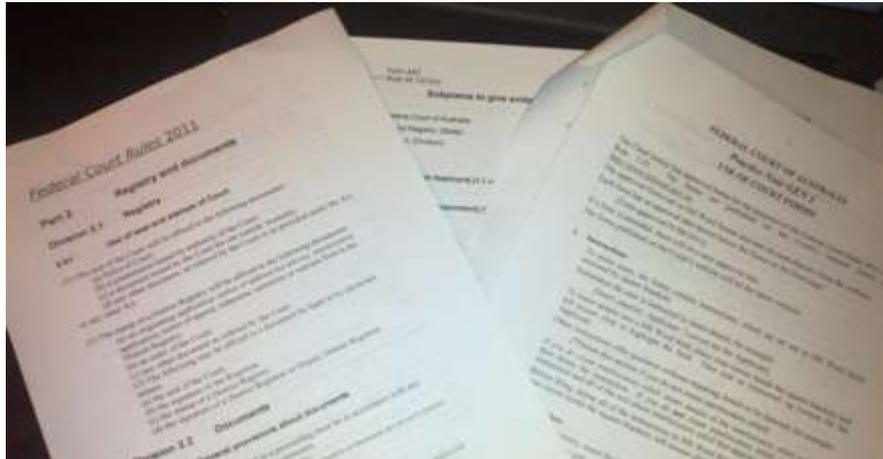
Dalam design ruang sidang FCA, hakim diberikan jalur tersendiri yang tidak bisa diakses oleh siapapun termasuk staf pengadilan. Jalur “rahasia” tersebut terhubung dengan ruangan hakim yang juga terpisah dengan ruang staf pengadilan lainnya. Jika hakim dalam memeriksa perkara memerlukan referensi buku atau bahan lain, tersedia ruangan khusus untuk mengakses bahan tersebut. “Dan biasanya persidangan diskor untuk keperluan tersebut”, ujar Louise Kenworthy.

Ada ruangan lain yang menarik perhatian kami, adalah tersedianya ruangan khusus untuk menyimpan alat bukti berupa dokumen penting, misalnya passport, dokumen pendirian perusahaan, kontrak dan lain-lain. Untuk mengamankan dokumen-dokumen yang bersifat sangat penting tersebut, FCA menyediakan ruang khusus yang disebutnya sebagai “top secret”. “Tidak semua orang bisa mengakses ruangan ini, dan pengamanannya berlapis.” Ujar Lauren Mc Commick.

Tour kami berikutnya menuju ruang tahanan. Kami ditunjukkan satu ruangan seukuran kurang lebih 2X2 meter, didalamnya ada satu set sofa. Kenyamanan ruang tersebut tidak berbeda dengan ruang lain di FCA, hanya dinding yang tidak dilapisi wallpaper. “itu adalah ruang tahanan”, bisik Louise. Cukup kaget mendengar penjelasan Louise. Namun ia segera berargumen bahwa itu implementasi penegakan hak asasi manusia. Meski ruang tahanan terkesan nyaman, namun keamanan tidak diabaikan, dan untuk membawa tahanan ke ruang sidang, digunakan jalur dan lift khusus.

Hal lain yang menjadi catatan dari tour of the court kami adalah design gedung mengakomodir para pihak atau petugas pengadilan yang memerlukan kebutuhan khusus. Sebagai contoh, FCA menyediakan jalan, meja khusus bagi juri yang menggunakan kursi roda. Demikian juga dengan fasilitas lain seperti, toilet, dan petunjuk ruangan. [an]

## Mempermudah Kerja Pengadilan, Semua Dokumen Terstandarkan



Melbourne | Kepaniteraan.online (10/5)

Sebagaimana di Indonesia, pengadilan akan disibukkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan berkas. Untuk mempermudah kerja pengadilan, FCA membuat standardisasi dokumen yang harus digunakan ketika publik mengajukan gugatan ke pengadilan. Sifat edaran tersebut mengikat, sehingga FCA akan menolak jika dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam "Practice Note" yang dikeluarkan langsung oleh Chief Justice Federal Court of Australia.

Diantara standardisasi dokumen yang diatur FCA adalah mengenai ukuran kertas. FCA menentukan jenis kertas yang harus digunakan untuk mengajukan aplikasi, yaitu kertas A-4 yang berkualitas tahan lama. Selain jenis kertas, FCA pun membuat standardisasi teknis penulisan. Misalnya tentang angka, baik tanggal, jumlah, atau lainnya. FCA mengharuskan semuanya ditulis dalam bentuk angka bukan hurup.

Mengenai formulir-formulir yang digunakan, FCA pun telah membuat berbagai template formulir yang sangat lengkap. Semua formulir yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara baik untuk para pihak maupun pengadilan telah ditetapkan dalam Practice Note Chief Justice dan Federal Court Rules. Semua template dokumen tersedia di website FCA, [www.fedcourt.gov.au](http://www.fedcourt.gov.au).

## Pendekatan Kreatif Mengelola Arsip

Melbourne | Kepeniteraan.online (10/5)



Arsip bisa menjadi persoalan rumit di pengadilan. Jika jumlah arsip yang kian menggunung persoalan yang muncul bukan saja bagaimana arsip itu disimpan, tetapi bagaimana arsip tersebut dengan mudah ditemukan kembali. Belum lagi, pertanyaan bagaimana arsip pengadilan tersimpan dengan aman.

Hari ketiga magang, para peserta program diajak mengunjungi ruang arsip. Arsip FCA tersimpan di lemari besi yang tahan api dan bisa digeser karena menggunakan rel. Untuk fasilitas ini, tidak terlalu surprise karena di Indonesiapun ada beberapa pengadilan yang sudah menggunakan fasilitas ini.

Yang menarik perhatian adalah kombinasi warna dan angka yang ada di “kuping” map berkas. Kombinasi warna dan angka ternyata nomor perkara. Ide ini sangat kreatif. Pertama, dari sisi penempatan di “kuping”. Dengan menuliskan nomor di kuping, identitas nomor perkara bisa terlihat langsung ketika map berkas disimpan di lemari arsip. Hal ini berbeda ketika penomoran dilakukan di cover depan map berkas. Nomor perkara baru akan diketahui ketika berkas diambil dari box, dan proses pencarian berkas pun menjadi dua tahap, yaitu mencari kelompok di lemari dan di box kemudian diambil map berkas dan dipastikan nomornya cocok dengan melihat nomor di cover depan map.

Kreatifitas kedua, kombinasi warna dan nomor. Setiap nomor diwakili oleh warna. Misalnya merah untuk angka 0, hijau untuk angka 1, kuning untuk angka 2, biru untuk angka 3 dan seterusnya. Pendekatan ini disamping memudahkan untuk mencari juga memudahkan untuk mengontrol berkas, termasuk berkas yang salah pengelompokannya. Misalnya untuk kelompok dua ratusan mesti warnanya dimulai dari warna kuning, sehingga jika tiba-tiba terselip warna biru, maka dipastikan map tersebut salah pengelompokannya.

Hal yang pasti adalah sentuhan teknologi informasi pada map berkas. Setiap berkas disertakan barcode yang akan membantu untuk input data dengan case management system. [an]

## Atasi Tunggakan Perkara, FCA Terapkan *Individual Docket System*



*OBROLAN AKRAB: Justice Murphi dan Sia Lagos berbicara akrab dengan peserta magang membicarakan manajemen perkara*

Melbourne | Kepaniteraan.online (15/05)

Tunggakan perkara menjadi permasalahan yang dihadapi oleh setiap pengadilan tak terkecuali Federal Court of Australia. Untuk mengatasi hal ini pada awal tahun 90-an FCA melakukan pembaruan manajemen perkara dengan salah satu agendanya menerapkan Individual Docket System (IDS). Penerapan IDS oleh FCA dilakukan melalui proses yang panjang antara lain melalui konsultasi dengan praktisi hukum terkemuka di Australia, dan berdiskusi dengan praktisi manajemen perkara dan persidangan baik di Australia maupun dunia.

Prinsip dasar dari IDS adalah setiap kasus yang diterima pengadilan akan dialokasikan secara acak ke hakim, dan hakim inilah yang akan bertanggungjawab untuk mengelola perkara tersebut dari perkara diterima hingga perkara tersebut selesai. Hal ini berbeda dengan sistem yang diimplementasikan sebelumnya (listing system) yang tidak memberikan tanggung jawab individu terhadap penyelesaian berkas.

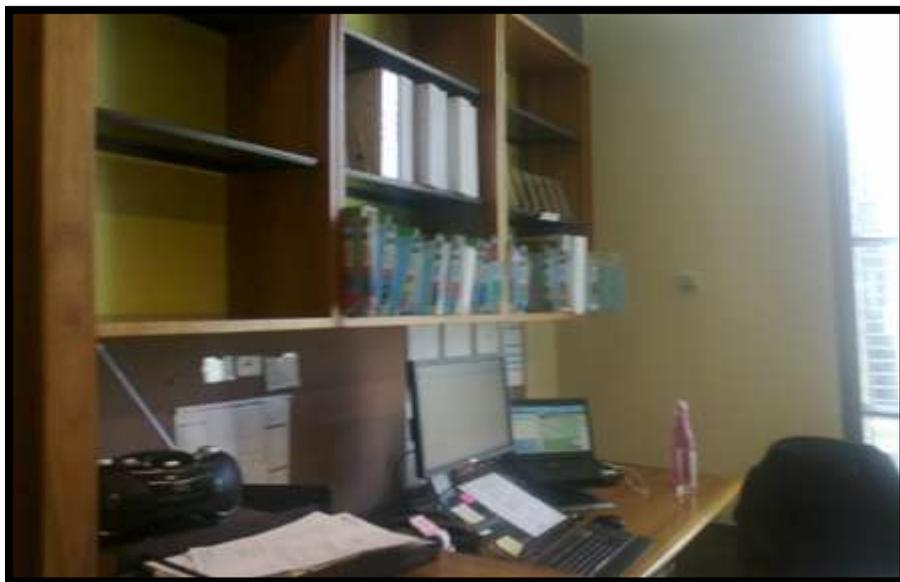
Demikian disampaikan oleh Justice Bernard Murphi dalam "obrolan" mengenai aplikasi sistem manajemen perkara perspektif majelis hakim bertempat di ruang kerjanya, Senin (14/5), di lantai 16 Gedung FCA, Melbourne. Dalam "obrolan" ini peserta magang didampingi oleh Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria. Perbincangan serupa pernah dilakukan bersama dengan David Proddle, Director Operations FCA, pekan lalu (Kamis, 10/5).

Baik Justice Murphi maupun David, keduanya berpendapat bahwa Individual Docket System sangat efektif untuk memonitor dan mengelola beban kerja hakim. Bahkan, sistem tersebut terbukti efektif dalam mengatasi tunggakan perkara di pengadilan.

## Manajamen Perkara

Setelah berkas perkara diregistrasi di kepaniteraan FCA, petugas kepaniteraan diberikan delegasi oleh Ketua Pengadilan untuk mendistribusikan berkas ke hakim. Dalam mendistribusikan berkas ini, petugas kepaniteraan mempertimbangkan beban kerja dari masing-masing hakim melalui buku instrumen docket hakim. Instrumen ini memberi informasi jumlah distribusi perkara pada masing-masing dan status penyelesaiannya. Prinsip yang dianut dalam distribusi berkas ini adalah keseimbangan beban kerja dari masing-masing hakim. Pada tahap ini petugas kepaniteraan melakukan input data pada sistem manajemen perkara.

Setelah berkas dialokasikan ke hakim, dengan sistem Individual Docket System, hakim yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap segala proses hingga perkara tersebut selesai diputus. Untuk membantu kerja hakim, masing-masing hakim dibantu oleh associate justice. Associate Justice adalah alumni fakultas hukum terbaik atau pengacara terpilih dengan tugas membantu hakim dalam melaksanakan tugasnya. Mereka yang menginput perkembangan penyelesaian perkara ke dalam Case Management System, mempersiapkan administrasi persidangan, mengelola agenda persidangan, menyusun draft putusan, hingga melakukan penelitian hukum tertentu yang diperlukan hakim dalam memutus perkara.



*Ruang Asisten Hakim: Hakim FCA dibantu oleh associate justice yang berasal dari alumni fakultas hukum terbaik atau pengacara .*

Dalam kunjungan ke ruang kerja Justice Murphy, nampak associate justice menempati ruang tersendiri. Berkas yang masuk ke docket Justice Murphy berada di ruangan ini. Berkas dikelompokkan berdasarkan proses penanganan perkara. Ada kelompok berkas yang baru diterima, proses pemeriksaan, hingga yang sedang dipersiapkan putusannya.

Sementara untuk mengatur jadwal kegiatan persidangan selain adanya case management system, associate justice atau asisten juga mengelola jadwal tersebut dalam Microsoft Outlook. Selain itu untuk penanganan perkara banding, Panitera urusan banding yaitu Angela Josan, telah mengelola persidangan secara teratur untuk semua negara bagian. Dalam presentasi hari Jum'at (11/05), Angela menunjukkan jadwal persidangan banding untuk semua hakim pada seluruh negara bagian Australia.

### **Monitoring Beban Kerja Hakim**

Untuk memonitor dan mengendalikan beban kerja hakim, Case Management System mengeluarkan laporan docket (docket report) untuk masing-masing hakim. Dalam docket report tersebut disampaikan status perkara yang ada di tangannya pada saat laporan dibuat. Informasi yang tersaji pada masing-masing perkara adalah: tanggal diregistrasi, nomor perkara, nama para pihak, jenis perkara, status penanganan perkara seperti ditunda, sidang pertama, persiapan pembacaan putusan, dll. Ketika sidang ditunda atau sidang pertama, dalam docket report juga disebutkan tanggal dan jam pelaksanaan persidangan.

Selain menerbitkan docket report, CMS juga menerbitkan "Single Judge Court Workload Report". Laporan kinerja individu hakim ini menampilkan informasi: jumlah perkara yang dialokasikan kedalam docket masing-masing hakim, jumlah perkara yang diselesaikan, nilai clearance rate, rata-rata waktu dalam docket, perkara yang melebihi 18 bulan dalam docket, total waktu untuk semua persidangan, rata-rata waktu persidangan, jumlah putusan yang diselesaikan, rata-rata halaman putusan yang dibuat, jumlah putusan yang disampaikan lebih dari 90 hari, dan jumlah putusan yang dipersiapkan lebih dari 90 hari. [an]

## Memastikan Perkara Selesai Tepat Waktu, FCA Lakukan Realokasi Perkara



*Peserta magang bersama David Priddle, Direktur Operasional FCA, berfoto bersama sesuai presentasi sistem manajemen perkara*

Melbourne | Kepaniteraan.online (15/5)

Federal Court of Australia (FCA) menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian perkara selama 18 bulan. Untuk memastikan setiap perkara diselesaikan tepat waktu, dalam laporan kinerja hakim disampaikan jumlah perkara yang telah melampaui 18 bulan. Laporan tersebut diperoleh dari Case Management System yang diupdate oleh asisten masing-masing hakim. Terhadap perkara yang telah melampaui 18 bulan pada docket hakim, Panitera melakukan realokasi perkara kepada hakim lain.

Demikian disampaikan Direktur Operasional Peradilan, David Priddle, kepada para peserta magang, Kamis (10/5). Menurut David, Realokasi ini dimaksudkan untuk memastikan setiap perkara bisa diselesaikan secara tepat waktu. Selain karena alasan melampaui batas waktu penyelesaian perkara, realokasi perkara bisa juga dikarenakan alasan “bias”, dikarenakan hakim yang bersangkutan memiliki relasi yang dikhawatirkan mengganggu asas imparsialitas.

Mengenai realokasi perkara, Case Management System FCA secara periodik mengeluarkan laporan perkara yang direalokasi. Selain berformat laporan, system pun menerbitkan dalam bentuk grafik sehingga mudah dibaca oleh pimpinan pengadilan. Selain realokasi perkara secara individu, CMS pun menerbitkan laporan perkara sistem kamar.

Untuk memonitor keadaan berkas yang ditangani oleh hakim, CMS pun menerbitkan laporan “stock of name” perkara yang dinamakan “All Current Matters in Judges Dockets” dalam setiap akhir bulan. Dalam laporan ini disampaikan informasi Sisa perkara bulan lalu, jumlah perkara yang berkurang karena transfer antar docket(realokasi), jumlah perkara berkurang karena selesai, jumlah perkara baru yang masuk docket, jumlah perkara masuk karena transper docket, dan total jumlah perkara dalam docket.

Laporan yang sama juga dibuat untuk masing-masing hakim yang tergabung dalam kamar perkara tertentu. Selain laporan diatas, CMS pun menerbitkan laporan detil perkara-perkara yang belum putus diatas 12 bulan. Laporan tersebut ada yang dibuat secara general dan juga detil berdasarkan masing-masing hakim.

### 24 Jam Update

Untuk dapat menerbitkan laporan-laporan sebagaimana tersebut diatas, David Priddle menjelaskan bahwa asisten hakim wajib mengupdate Case Management System maksimal dalam waktu 24 jam setelah terjadinya proses tahapan penanganan perkara. Batas waktu ini ditetapkan sebagai komitmen pengadilan dalam menjalankan transparansi informasi.

Sedangkan untuk menjadin akurasi data dalam sistem informasi, FCA selalu melakukan audit data. Hasil audit ini digunakan untuk melakukan perbaikan data. “Data keliru bisa menjadi masalah besar bagi pengadilan”, pungkas David Priddle. [an]

## Dua Jam Bersama Pak Murphy :Dari Class Action, Penyusunan Putusan hingga Ulang Tahun Pak Bambang



*Kejutan Ulang Tahun : FCA tiba-tiba memberikan kue ulang tahun ke Pak Bambang disaat peserta berdialog dengan Justice Murphy, Senin (14/5). Nampak sekali hubungan yang akrab antara MA dan FCA*

Melbourne: Kepaniteraan.Online (15/5)

Justice Murphi salah seorang hakim FCA yang sangat dekat dengan peserta magang. Pribadinya yang ramah dan humoris menjadikan hakim yang pakar di bidang class action ini langsung mencair dengan peserta sejak pertemuan pertama. FCA menyambut peserta magang dalam kegiatan mirip welcome party yang dikemas dengan acara makan siang bersama. Justice Murphi pun sangat fasih menyapa peserta dengan sebutan Pak dan Bu. Kedengarannya lucu ketika Pak Murphy menyapa “Selamat Pagi Pak Bambang...”. Dia pun memberitahu cara menyapa ala Indonesia kepada asistennya ketika kami berkunjung ke ruang kerjanya, Senin (14/5).

Oleh bu Sia Lagos, peserta magang diagendakan untuk berdialog dengan Justice Murphi di ruang kerjanya hari Senin kemarin (14/5). Tema obrolan yang ditentukan tentang “Application of Case Management System : jugdes chambers perspective”. Pembawaanya yang santai dari Justice Murphy membuat peserta leluasa bertanya hingga hal yang detail. Ia sangat semangat ketika bicara soal class action.

“Saya telah menangani 35 kasus class action ketika menjadi pengacara”, ujar Justice Murphy. Beberapa dari kasus tersebut, kata Justice Murphy, merupakan kasus internasional yang melibatkan berbagai lawyer Eropa dan Amerika (Kanada). Ia meyakini sistem class action di Australia menjadi yang terbaik di dunia. Ia menawarkan agar class action menjadi fokus kegiatan magang periode berikutnya (bulan Oktober). Usulan ini disambut positif oleh peserta dan ibu Sia Lagos.

Dari pembicaraan class action, beralih ke penyusunan putusan. Justice Murphy berbicara mengenai template dan gaya bahasa putusan. Ia mengaku terbantu dengan adanya template yang disediakan oleh FCA. Soal bahasa putusan, Ia mengkritisi gaya penulisan putusan yang menggunakan istilah-istilah hukum yang rumit sehingga susah dipahami.

“Hakim-hakim dulu membuat putusan selalu dengan bahasa-bahasa yang rumit. Semakin banyak istilah-istilah teknis hukum merasa putusannya berkualitas”, ujarnya memberi ilustrasi.

Menurutnya putusan harus disampaikan dalam bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Hal ini karena pencari keadilan bukan pakar hukum. “Mereka masyarakat awam yang harus mengerti kenapa pengadilan menolak atau mengabulkan gugatannya”, ujar Hakim FCA yang baru bertugas selama setahun ini.

“Namun untuk membuat pertimbangan hukum dengan lugas dan menggunakan bahasa sederhana bukan hal yang mudah, perlu pemahaman yang tinggi terhadap kasus dan penerapan hukumnya”, tegasnya.

Ditanya soal proses penyusunan putusan, Justice Murphy menjelaskan bahwa ia dibantu oleh associate justice atau mirip asisten hakim di Indonesia. Asisten menyusun kerangka putusan kemudian hakim melengkapi dengan pertimbangannya. Tidak jarang Justice Murphy menyusun putusan di rumah. Ia menggunakan aplikasi “Dragon Dictation” yang bisa merubah suara ke teks.

Untuk kegiatan koreksi, Justice Murphy menggunakan fitur “track changes” yang ada di Microsoft Office Word. Fitur ini merekam jejak editing dokumen. Melalui cara ini, Ia akan mengetahui kalimat mana yang diubah atau dihapus. Jelas sekali sosok Justice Murphy adalah sosok hakim yang melek teknologi informasi. “Udah ramah, ganteng, gaul lagi”, ungkap Mia Hafsari menilai sosok Justice Murphy.

## **Kejutan Ulang Tahun**

Ketika peserta asyik bertanya dengan Justice Murphy dan Ibu Sia Lagos, tiba-tiba Andrea Jarrat, Executive Officer FCA masuk ruangan membawa kue ulang tahun. Ternyata pihak FCA mengetahui bahwa diantara peserta, yaitu Bambang Heri Mulyono, berulang tahun pada hari itu, 14 Mei. Wajah pak Bambang nampak terkejut sekaligus terharu dan gembira. Dengan sigap, Justice Murphy dan Ibu Sia Lagos memimpin lagu “Happy Birthday” untuk pak Bambang. Setelah selesai Justice Murphy meminta peserta magang untuk menyanyikan lagu ulang tahun dalam bahasa Indonesia. Benar-benar suasana meriah dan penuh keakraban saat itu.

“Ini adalah ulang tahun pertama saya yang dirayakan dengan potong roti, biasanya kalau ulang tahun dirayakan dengan nasi tumpeng”, ujar Bambang yang disambut tawa.[an]

## Semua Informasi yang Dibutuhkan Hakim, Tersedia di Perpustakaan FCA



*Tour of Library : John Botherway, Manager Library & Informasi Services FCA memberikan penjelasan koleksi perpustakaan kepada peserta magang*

Melbourne | kepaniteraan.online (17/5)

H-3 program magang (Rabu, 16/5), peserta diajak ke perpustakaan Federal Court yang berada di lantai 11 Law Court Building. Setengah bagian dari lantai tersebut diperuntukkan bagi perpustakaan. Dari sisi kenyamanan tidak jauh berbeda dengan Perpustakaan MA. Yang berbeda adalah jenis koleksi perpustakaan. Perpustakaan FCA berisi tentang semua informasi yang dibutuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara. Seolah perpustakaan ini didedikasikan semata-mata untuk hakim. Koleksi terbesar adalah law report, baik Australia maupun dari negara-negara Anglo-Saxon. Koleksi Law Report di perpustakaan FCA terbilang lengkap, bahkan koleksi kuno di tahun 1800-an masih terawat dengan baik.

Dukungan terhadap hakim, selain ketersediaan koleksi pustaka yang lengkap juga update informasi jika ada koleksi baru baik berupa buletin, informasi online, atau law report elektronik. Pihak perpustakaan pun secara berkala mengadakan pelatihan kepada hakim atau asisten hakim untuk menggunakan sistem electronic legal research yang dimiliki oleh FCA atau jaringan dokumentasi informasi hukum internasional seperti Lexis-Nexis, West Law, atau Thomson Legal Online.

Informasi tersebut disampaikan oleh John Botherway, Manager Library & Informasi Services FCA, kepada peserta magang dalam serangkaian kegiatan magang yang diberi nama “tour of library”, Rabu (16/5) di ruang kerjanya.

John juga menjelaskan, Perpustakaan FCA menyediakan klipring informasi secara elektronik tentang segala hal yang terkait dengan FCA yang berasal dari pemberitaan media terkemuka di Australia. Kliping ini disediakan oleh pihak ketiga yang menaruh perhatian terhadap peradilan melalui kerjasama kontraktual.

Selain klipring elektronik, Perpustakaan FCA pun memiliki koleksi risalah persidangan dari parlemen ketika menggodog sebuah peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan pun menjalin kerjasama mutual dengan Universitas. “Universitas atau FCA saling meminjam koleksi perpustakaan jika kedua belah pihak membutuhkan bahan pustaka yang tidak tersedia”, ungkap John Botherway. Jaringan kerjasama mutualistis ini juga dilakukan dengan pihak swasta yang fokus terhadap law report.



Barcode : pengelolaan sirkulasi koleksi perpustakaan didukung oleh sistem barcode, baik untuk koleksi buku maupun anggota perpustakaan (hakim)

Untuk mengelola Perpustakaan FCA memiliki sistem aplikasi pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi secara nasional. “Jika ada yang mencari koleksi perpustakaan, sistem akan menunjukkan koleksi tersebut ada di perpustakaan mana di semua negara bagian”, ungkap Jhon Botherway ketika menjawab pertanyaan Binziad Kadafi, Senior Manager AIPJ.

Untuk memberikan pelayanan peminjaman buku kepada hakim, Perpustakaan FCA memiliki sistem yang dilengkapi fasilitas barcode. Selain buku yang dilekati barcode, tiap hakim pun diberikan identitas barcode. Melalui sistem ini, sirkulasi buku bisa dimonitor dengan efektif.

## Putusan Sederhana Ala FCA



*Justice Murphy dan Sia Lagos bersama peserta magang se usai berdiskusi tentang format putusan FCA*

Melbourne | Kepaniteraan.online (17/5)

Hampir 2 jam, peserta magang, Bambang Heri Mulyono (hakim peradilan umum/hakim yustisial MA), Subur (hakim PTUN/hakim yustisial MA), Asep Nursobah (hakim peradilan agama/hakim yustisial MA), Achmad Cholil (Hakim Peradilan Agama/Mahasiswa Universitas Melbourne) dan Binziad Kadafi (Senior Manager Court Reform & Access to Justice, Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ), berdiskusi panjang lebar dengan Justice Bernard Murphy di ruangannya di gedung Federal Court of Australia (FCA), dengan bantuan penerjemah Mia Hapsari. Didampingi Sia Lagos, Panitera Kepala FCA untuk negara bagian Victoria, beliau membagi banyak pandangan dan pendapatnya pada kami. Justice Murphy baru setahun diangkat sebagai hakim pada FCA. Usia jabatan ini membuatnya dikategorikan sebagai hakim junior, terutama jika dibandingkan hakim-hakim lain yang bisa jadi sudah puluhan tahun menjabat.

Meski junior, bukan berarti pengalaman hukum Justice Murphy belum matang. Sebelum mengenakan toga hakim, dia puluhan tahun malang melintang sebagai pengacara ternama di Australia. Firma hukumnya masuk dalam jajaran teratas, yang mempekerjakan sedikitnya 250 orang pengacara, jumlah yang signifikan untuk menguasai persaingan dengan firma yang lain. Selain itu, perkara-perkara besar yang ditanganinya secara langsung, terutama berbagai perkara class action di bidang perlindungan konsumen, menjadikan nama Murphy cukup dikenal di komunitas hukum Australia.

Namun tetap saja, terlepas dari latar belakangnya, di FCA Justice Murphy masih seorang junior. Selama beberapa waktu, dia harus rela untuk duduk di bawah bimbingan hakim FCA lain seniornya. Sang hakim mentor biasanya akan berperan memberi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dari Justice Murphy ketika menjalankan fungsinya sebagai hakim. Tanpa diminta, sang mentor juga bisa memberi masukan kepada hakim baru yang dibimbingnya mengenai kemampuan yang perlu dikembangkan, sesuatu yang sebenarnya tabu untuk dilakukan antar-hakim di Australia, jika di luar hubungan

mentor-junior. Di tengah kesibukannya, sang mentor harus bersedia meluangkan waktu untuk itu.

Ada satu topik yang paling banyak dibahas Justice Murphy dalam diskusinya dengan kami, yaitu soal pembuatan putusan. Menurut Justice Murphy, sebagian besar hakim FCA berasal dari kalangan pengacara berpengalaman. Ada juga yang berasal dari kalangan pengajar sekolah hukum, serta mereka yang sebelumnya pernah menjabat hakim di level yang lebih rendah. Namun mayoritas dari pengacara yang menjadi hakim itu adalah barrister, atau pengacara yang bergelut di bidang litigasi.

Kultur kerja yang terbangun di kalangan barrister ini unik. Mereka sangat independen dalam bekerja dan cenderung solitaire, mengingat umumnya mereka menggunakan bentuk kantor hukum perorangan, bukan firma. Ketika menjadi hakim, karakter independen ini juga masih kuat membekas. Ada baiknya sebenarnya, karena toh hakim memang dituntut untuk selalu bersikap independen. Namun ketika karakter independen pada cara kerja barrister diterjemahkan ke dalam konteks jabatan hakim yang sifatnya publik, hal itu bisa menjadi masalah. Masalah utama ditemukan pada cara mereka membuat putusan.

Dulu terasa sekali pilihan dan gaya individual seorang hakim dalam menuliskan putusannya. Tidak hanya dari seberapa panjang lebar analisisnya, termasuk bagaimana format dan tata urutannya. Jika situasi itu masih bertahan, pasti akan sulit bagi Justice Murphy untuk bisa beradaptasi di awal jabatannya. Karena tidak jelas putusan mana dengan format dan gaya apa yang perlu diacu, karena sangat beragam. Atau bisa jadi Justice Murphy memilih untuk menggunakan format dan gayanya sendiri, yang akhirnya hanya akan menambah model putusan di antara banyaknya model yang sudah ada. Bayangkan, jika maraknya format dan gaya putusan menyulitkan bagi seorang hakim baru, bukankah itu artinya juga menyulitkan pelaku peradilan lain seperti pengacara? Lebih menyulitkan lagi tentu saja bagi publik, khususnya masyarakat pencari keadilan.

## **Template Putusan**

Untuk itulah menurut Justice Murphy, sudah beberapa lama FCA mengadopsi penggunaan sebuah template putusan oleh para hakim. Template ini sebenarnya sudah cukup lama diperkenalkan di luar pengadilan oleh berbagai organisasi, terutama akademi hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari diintroduksinya template ini adalah agar para hakim memiliki cara yang lebih seragam dalam menyampaikan pesannya ke audiens mereka, publik secara luas, demi memudahkan audiens tersebut dalam menerima pesan. Template bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan apa isi pesannya karena jelas akan mengganggu independensi hakim.

Tujuan itu ditangkap dengan baik oleh FCA. Pengadilan Federal Australia ini menyadari betul bahwa hakim bekerja untuk masyarakat. Fungsi hakim yang paling utama adalah mengurangi ketegangan di masyarakat dengan menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat lewat jalur hukum secara adil, agar mereka tidak menempuh jalur sendiri untuk itu, yang bisa berujung pada kekerasan dan hal-hal buruk lainnya. FCA, atau lebih tepat Justice Murphy meyakini, bahwa fungsi itu tidak akan berjalan dengan baik jika apapun penyelesaian yang adil yang dibuat Pengadilan tidak bisa dimengerti secara luas. Masyarakat tidak akan paham di mana letak keadilan dari suatu putusan, dan apa

peran Pengadilan di dalamnya, yang akhirnya membuat ketegangan di masyarakat pun tidak banyak berkurang.

Menurut Justice Murphy, seorang hakim harus bisa berkomunikasi dengan publik lewat putusannya. Mereka tidak seharusnya berkomunikasi hanya dengan sesama hakim, atau dengan sesama anggota komunitas hukum (*jurist*), melainkan kepada publik pada umumnya. Hanya putusan yang mudah dipahamilah yang bisa menjangkau masyarakat. Dan putusan yang mudah dipahami dimulai dengan format yang standar, yang mudah dibaca lebih bisa diduga susunan dan sistematikanya (*predictable*).

Sebenarnya template putusan yang digunakan di FCA bukanlah program yang rumit. Dia hanya berbasis microsoft word yang bisa digunakan siapa pun. Dia pun hanya memuat headings dan sub-headings yang perlu diisi oleh para hakim jika dianggap relevan, yang menjadi semacam daftar periksa (*check list*) bagi seorang hakim untuk memastikan kelengkapan dari putusannya. Template putusan sama sekali tidak menyentuh substansi, hanya kerangka bukan isi. Soal apa yang ditulis hakim dalam putusannya, di situlah letak independensi dan kompetensi hakim, yang tidak satu pun bisa mengintervensinya.

Jika kita ambil satu putusan FCA, kita akan dibawa pada halaman pertama yang bagi pembaca sangat membantu. Halaman pertama itu memuat beberapa informasi penting mengenai putusan.

Di halaman pertama jelas dituliskan nama Pengadilan pemutus; nama dan nomor putusannya sendiri; rumusan bagaimana putusan itu seharusnya dikutip (atau lazim dikenal dengan citation); asal perkara (yang menerangkan perkara itu berasal dari banding dari pengadilan mana); nama para pihak; nomor berkas; tanggal putusan; serta keterangan mengenai kuasa hukum yang mendampingi para pihak. Namun yang paling menarik adalah indeksing dari putusan, atau dalam istilah pengadilan Australia, catchwords. Sebenarnya catchwords ini adalah kumpulan kata kunci yang akan memudahkan siapapun untuk mendapatkan putusan yang bersangkutan ketika putusan itu nanti sudah dimasukkan ke dalam database. Catchwords diisi oleh hakim yang memutus, atau asistennya. Catchwords bukan sekedar kata, melainkan beberapa konsep hukum yang relevan dengan isi suatu putusan yang digambarkan dengan kata.

Di halaman kedua dari putusan FCA, kita bisa menemukan subheading yang memuat pertimbangan hakim, atau dalam istilah FCA, reasons for judgment, yang tentu saja harus diisi hakim dan apa isinya ditentukan hakim sendiri. Subheading ini bisa memuat penjabaran atas fakta; isu hukum yang mengemuka (questions of law); analisis atas perundang-undangan, putusan terdahulu mengenai pokok perkara yang serupa; dan lain-lain. Semua terserah hakim untuk memuatnya atau tidak. Template hanya menjadi semacam alat bantu untuk mengingatkan, apa-apa saja yang harus diperiksa oleh hakim dalam menyusun putusannya. Lalu terakhir, akan ada bagian di mana hakim diminta menyampaikan kesimpulannya.

### **Penomoran Paragraf: Langkah Kecil Namun Berguna**

Aspek menarik lain dari template putusan yang layak diperhatikan adalah penggunaan nomor paragraf. Kesannya memang inisiatif ini sangat sederhana, namun ternyata

dampaknya sangat luar biasa, baik bagi kepentingan hakim sendiri, kepentingan pengembangan ilmu hukum, juga kepentingan akses publik terhadap keadilan (access to justice). Bagi hakim, penomoran paragraf bermanfaat untuk menjadikan putusannya lebih sistematis dan mudah dikutip, termasuk dalam putusan itu sendiri. Misalnya daripada mengulang menjelaskan suatu konsep yang sudah dijelaskannya dalam suatu paragraf, hakim yang bersangkutan tinggal menyebutkan paragraf mana yang ingin dia rujuk.

Bagi fakultas hukum, jelas penomoran paragraf dalam putusan akan memudahkan dalam menginventarisirnya ke dalam database, termasuk tentu saja mengutip putusan tersebut. Patut diketahui bahwa seluruh putusan FCA akan dimasukkan ke dalam database AustLii, sebuah sistem informasi hukum yang jadi pegangan komunitas hukum di Australia yang memuat tidak hanya putusan, peraturan perundang-undangan, namun juga berbagai jurnal dan artikel hukum.

AustLii dikembangkan dan dikelola oleh Fakultas Hukum University of New South Wales bekerjasama dengan Institut Teknologi Sydney. Database AustLii dapat diakses oleh siapa pun secara cuma-cuma. Ketika putusan FCA diunggah ke dalam AustLii, penomoran halaman yang semula dibuat menjadi tidak relevan. Sebab AustLii menggunakan basis html yang memang tanpa halaman. Di sinilah penomoran paragraf menjadi penting. Tanpa nomor halaman sekalipun, asalkan setiap paragraf suatu putusan memiliki nomornya, maka rujukan terhadap putusan tersebut akan tetap tepat. Bagi pencari keadilan, penomoran paragraf sangat membantu dalam membaca dan memahami putusan, mengontrol akurasi putusan, serta lagi-lagi, dalam mengutip putusan.

Aspek terakhir yang menarik dari format putusan FCA adalah kemungkinannya untuk menggunakan lampiran gambar atau grafik dalam menjelaskan suatu fakta hukum. Seringkali daripada menjelaskan panjang lebar fakta hukum tertentu, hanya dengan menampilkan suatu gambar atau bagan, suatu masalah bisa menjadi jelas dengan sendirinya (self explanatory), atau lebih mudah dipahami.

## **Belajar dan Belajar**

Di luar peran template putusan, sebagai seorang hakim baru Justice Murphy juga membutuhkan media lain untuk membiasakannya dengan tugas menulis putusan. FCA memiliki program pendidikan bagi hakim baru yang disebut sebagai sekolah menulis putusan (decision writing school). Melalui program ini, para hakim yang berpengalaman akan membagi pengetahuan dan keterampilannya secara sistematis dalam menulis putusan dengan peserta. Semua aspek praktis terkait proses yang harus ditempuh seorang hakim saat membuat putusannya akan dibahas. Pengetahuan dan keterampilan tersebut bahkan telah dibakukan oleh penyelenggara program pendidikan ke dalam modul-modul pelatihan. Dengan kredibilitasnya, program pendidikan ini telah menjadi suatu kebutuhan di kalangan hakim.



*Bersama Justice Associate usai persidangan. Justice Associate (paling kanan) adalah asisten hakim yang direkrut dari alumni fakultas hukum terbaik atau para pengacara*

Media lain yang sangat membantu hakim di FCA dalam menjalankan tugasnya, termasuk menyusun putusan, adalah peran asisten hakim (judge assistant). Para asisten hakim ini biasanya adalah lulusan terbaik dari fakultas-fakultas hukum yang dipilih dengan sangat selektif. Mereka dikontrak untuk 1 tahun, paling lama 2 tahun, dan digaji sebagaimana layaknya pegawai pengadilan. Fungsi mereka yang utama adalah membantu hakim dalam mengelola proses persidangan, serta melakukan penelitian hukum dalam rangka penulisan putusan, jika diminta oleh hakim. Motivasi dari beberapa asisten hakim yang kami temui di FCA yang paling mengemuka adalah untuk belajar langsung dari hakim yang mereka bantu dan mendapatkan pengalaman praktis di pengadilan. Namun disadari atau tidak, mereka juga sebenarnya menjalankan peran sebagai rekan belajar dan teman diskusi dari para hakim.

Salah satu tantangan yang paling berat bagi Justice Murphy adalah memulai dan menuntaskan proses menulis putusannya. Menurutnya, sangat kuat keinginan untuk segera menulis putusan tepat setelah persidangan dilakukan, dan segera setelah keterangan para pihak selesai didengar. Sebab di saat itulah ingatannya masih sangat segar mengenai suatu perkara, yang tentu akan membantu meringankan bebannya. Namun, jumlah perkara yang harus ditangani menyulitkannya untuk melakukan itu. Kadang, meski sangat jarang, baru 4 bulan setelah persidangan dituntaskan, Justice Murphy memulai menulis putusannya. Di tengah diskusi kami, Justice Murphy menunjukkan satu troli yang di dalamnya berjejer folder berisikan berkas perkara. Dia tengah menuliskan putusan atas perkara itu.

Di akhir pertemuan kami, Justice Murphy sempat mengkopikan 3 putusan yang dia anggap sebagai putusan terbaik yang pernah dia buat. Putusan pertama mengenai perlindungan konsumen setebal 34 halaman. Putusan kedua mengenai perpajakan setebal 67 halaman. Putusan ketiga mengenai arbitrase yang relatif sederhana, setebal 23 halaman.

Terlepas seberapa baiknya putusan Justice Murphy, Sia Lagos mencoba membandingkannya dengan Chief Justice Patrick Keane (Ketua FCA), yang menurut Sia adalah satu di antara orang terpintar di Australia. CJ Keane bisa menuliskan putusan atas perkara yang cukup kompleks hanya dalam 15 halaman. Tidak hanya pendek, putusan CJ Keane juga sangat mudah diikuti oleh siapa pun karena memang selalu

menggunakan bahasa sederhana (*plain language*) dan cara bertutur yang apik. Menurut Sia, FCA saat ini ada dalam posisi bahwa menulis putusan secara berpanjang-panjang dengan bahasa yang rumit dan terkesan canggih (*sophisticated*) tidak lagi membuktikan keahlian seseorang. Malah hal itu dianggap sebagai bentuk dari kelemahan yang perlu diperbaiki. Hakim yang hebat menurut Sia, adalah mereka yang bisa menuliskan putusannya dengan singkat dan dengan bahasa sesederhana mungkin, agar pesan yang dikandung putusan itu juga bisa menyentuh masyarakat awam –tentu saja tanpa mengorbankan substansi. Karakter hakim seperti itulah yang dimiliki CJ Keane dan akan segera dikuasai oleh Justice Murphy dari proses belajarnya. (Penulis :Binziad Kadafi (Senior Manager Court Reform & Access to Justice, Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ)),

## Imaginasi!

### Hal Penting untuk Rekayasa Proses Kerja Pengadilan

Melbourne | Kepaniteraan.Online (18/05)

Kamis, 17 Mei 2012, peserta magang kembali bertatap muka dengan Warwick Soden, Panitera FCA yang membawahi seluruh Kepaniteraan (Registry) di berbagai negara bagian di Australia (Principal Registry). Warwick sendiri sebenarnya berkedudukan di Sydney dan hanya sesekali berkunjung ke Melbourne. Namun kali ini beliau secara khusus datang ke Melbourne untuk bisa membagi pengalamannya dengan peserta, terutama mengenai *court's business process reengineering* (BPR), atau rekayasa proses kerja pengadilan. Warwick memulai paparannya (yang sebagian pernah disampaikan saat berkunjung ke Indonesia dan memberi materi di sebuah lokakarya di MA pada Desember 2011) dengan bercerita bahwa kurang lebih 8 tahun yang lalu, ada sebuah proses yang dilalui FCA untuk mendapatkan gambaran mengenai apa masa depan yang akan dimiliki FCA. Imaginasi para hakim, panitera, dan staf FCA dikumpulkan tentang gambaran masa depan tersebut. Guna membantu mengeksplorasi imaginasi tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaannya berurut dan saling terkait. Mulai dari pertanyaan mengenai dunia usaha (yang merupakan pengguna jasa FCA paling besar), yaitu “apakah dunia usaha akan menjalankan kegiatannya secara elektronik?” Lalu pertanyaan berlanjut pada, “apakah profesi hukum akan dipaksa oleh klien mereka (dunia usaha) untuk bekerja secara elektronik?” Akhirnya pertanyaan akan menjadi, “apakah profesi hukum karenanya, akan mengharapkan pengadilan untuk bekerja secara elektronik?”

Jika jawaban atas semua itu “ya”, maka pertanyaan yang diajukan menjadi lebih detail. “Apakah dokumen-dokumen pengadilan akan dibuat dalam bentuk elektronik?” Selanjutnya, “benarkah bahwa jika pengadilan bekerja secara elektronik dapat meningkatkan efisiensi?” Lantas, “apakah biaya pengadilan bisa dipungut secara elektronik?” Seterusnya, “apakah data pada berbagai dokumen Pengadilan tersebut harus dimasukkan lebih dari satu kali?” Lalu, “bisakah suatu dokumen diakses oleh lebih dari 1 orang dalam waktu bersamaan?” Hingga, “apakah perlu ada perubahan peraturan untuk mengatur itu semua?”

#### Detail Perubahan

BPR adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses yang harus ditempuh guna melakukan perubahan atas hal-hal di atas. Ketika pengadilan membuat keputusan bahwa pada waktu tertentu tidak akan ada lagi dokumen kertas yang boleh diajukan ke Pengadilan, langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan keputusan itu disebut BPR.

Masa transisi tentu saja harus dikelola secara hati-hati. Proyek percontohan kadang diperlukan di FCA, khususnya untuk mengkombinasikan antara hakim yang belum terbiasa menggunakan komputer (hingga cenderung kuatir terhadap perkembangan

baru ini) dengan hakim yang sudah familiar dengan sistem teknologi informasi. Lebih jauh, FCA pun menyediakan pelatihan kepada kalangan profesi hukum dengan mengunjungi firma-firma hukum mereka. Dengan begitu, FCA dapat memperkenalkan sistem kerja yang baru itu dengan cara yang tidak mengancam. Jika sistem ini diterapkan nantinya, FCA pun telah mengalokasikan sumberdaya untuk membantu pihak berperkara yang memilih untuk tidak menggunakan pengacara (unrepresented litigants) untuk mengajukan berkas perkaranya secara elektronik.

Hingga saat ini, sekitar 30% dokumen pengadilan diajukan secara elektronik oleh profesi hukum. Ketika diajukan secara manual pun, berkas-berkas tersebut akan di-scan ke dalam bentuk .pdf oleh pengadilan. Namun tentu saja tidak semua berkas harus disimpan oleh FCA. Hal ini menjadi topik yang harus dikonsultasikan dan disepakati oleh para hakim dan para pemangku kepentingan. Namun FCA telah menyiapkan sistem penyimpanan elektronik hingga kapasitas 100 terrabytes, yang sepertinya memadai untuk menyimpan berbagai dokumen pengadilan tersebut.

Inisiatif lain yang sudah diambil adalah mengubah fungsi website Pengadilan menjadi fasilitas untuk menjalankan kegiatan dan menyediakan jasa, daripada sekedar menyampaikan informasi mengenai Pengadilan. Website inilah yang nantinya akan menjadi titik temu dari berbagai pihak, di mana para pengacara bisa masuk ke dalam sistem, memasukkan dokumen mereka, dan berinteraksi secara virtual melalui fasilitasi sistem itu dengan panitera, hakim, dan tentu saja pihak lawan.

Warwick menyatakan bahwa sistem kerja yang baru ini akan berdampak besar bagi FCA. Dia menyadari bahwa nantinya, jika efektif diterapkan pada 2013, terdapat berbagai penyesuaian yang harus dilakukan. Misalnya terhadap profil staf yang akan dibutuhkan ke depan setelah sistem menjadi elektronik, hingga pelatihan dan peningkatan kapasitas staf yang ada untuk mampu beralih dari cara kerja manual ke elektronik, sesuatu yang wajar untuk dikelola di organisasi mana pun yang ingin berubah. Terhadap organisasi FCA sendiri, pengaruh sistem ini perlu diantisipasi. Sebagai contoh, dengan sistem elektronik sebagian besar aktivitas pengadilan sebenarnya bisa dikelola secara terpusat, sehingga sumberdaya yang diperlukan oleh setiap perwakilan FCA di berbagai negara bagian bisa menjadi lebih efisien.

Sistem baru juga akan berpengaruh terhadap waktu kerja Pengadilan. Dengan sistem elektronik ini sebenarnya Pengadilan bisa menerima berkas perkara selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Karena semua bisa dilakukan dari manapun dan kapanpun, selama berkas elektroniknya bisa diinput ke dalam sistem. Tentu saja langkah lebih lanjut dalam memproses perkara tersebut akan diambil dengan mengikuti hari kerja dan jam kerja Kepaniteraan, di mana misalnya ketika suatu berkas diinput Minggu siang oleh seorang pengacara, maka sistem kerja Kepaniteraan akan mengidentifikasinya sebagai berkas yang dimasukkan pada Senin pagi sesuai hari dan jam kerja Kepaniteraan berikutnya.

### **Perlindungan yang Sempurna**

Adapun mengenai keamanan sistem, Warwick menginformasikan kepada kami bahwa FCA pernah sengaja menyewa salah satu peretas terbaik di dunia untuk menguji seberapa kuat perlindungan terhadap sistem kerja FCA yang baru. Hasilnya cukup

memuaskan. Bisa dipastikan sistem e-Court yang akan diluncurkan FCA tahun depan, dan menurut Warwick tidak menyerap biaya terlalu besar, sudah sepenuhnya terproteksi.

Ketika kami tanyakan mengenai kerangka hukum yang menaungi langkah progresif yang diambil ini, Warwick menyatakan bahwa keputusan FCA cukup untuk memfasilitasinya. Warwick yakin bahwa keputusan soal ini mirip dengan kebijakan Pengadilan bertahun-tahun yang lalu bahwa dokumen/berkas perkara harus diajukan ke Pengadilan dengan diketik dan menggunakan kertas berukuran A4. Toh, tidak ada yang mempersoalkan itu dulu, dan dalam praktek, kebijakan tersebut ditaati. Namun menurut Warwick penggodokan serius masih terus dilakukan, bukan hanya mengenai penyesuaian proses kerja baru ini dengan tata cara beracara di Pengadilan, juga yang tidak kalah penting, mengenai dasar hukum agar kebijakan ini tidak dipermasalahkan secara hukum ke depan. Yang pasti, prinsip yang dianut Warwick Soden sangat jelas, dan itu akan terus diperjuangkannya di garis depan, *“to make the courts run like business”* atau *“menjadikan pengadilan bekerja seperti layaknya sebuah perusahaan”*. [binzihad kadafi]